

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling penyebab adanya tindakan *earning management* bisa diterangkan melalui teori agensi jika dilihat dari sudut pandang teori akuntansi (Manossoh, 2016). Mangkusuryo dan Jati (2017) mendefinisikan teori agensi sebagai suatu kontrak diantara *principal* (pihak yang memperkerjakan *agent* untuk menjalankan tugas) dan *agent* (orang yang diperkerjakan oleh *principal* untuk melaksanakan kepentingan *principal*). Hubungan keagenan timbul ketika manajemen (*agent*) diperkerjakan oleh pemegang saham (*principal*) untuk melakukan sebuah jasa dan seterusnya mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen itu. *Agency theory* dilandasi oleh tiga asumsi yang dikemukakan oleh Kathleen Eisenhardt M yaitu: (1) Asumsi sifat manusia yang menekankan sifat manusia memiliki sifat rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), penghindaran resiko dan keegoisan (*self interest*); (2) Asumsi keorganisasian yang menjelaskan terjadinya konflik antara anggota kelompok dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent*; (3) Asumsi informasi, yaitu, informasi diperlakukan sebagai item transaksi (Manossoh, 2016).

Terkadang hubungan keagenan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik kepentingan antara petinggi perusahaan, umumnya terjadi pada para pemegang saham dengan manajemen (*agent*), dimana para *principal* dan *agent* ini memiliki tujuan yang berlawanan. Dimana (*principal*) tidak mempunyai informasi yang cukup terkait kinerja *agent* dan pemahaman agen tentang perusahaan secara keseluruhan. Sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang dikenal sebagai asimetri informasi.

Terdapat 2 tipe asimetri informasi antara lain: (1) *Adverse selection* dimana manager dan orang dalam (*insider*) lainnya mempunyai lebih banyak pengetahuan terkait keadaan perusahaan dibanding dengan pihak luar (investor); (2) *Moral Hazard* dimana manager bisa melakukan hal yang melanggar kontrak, yang secara etika maupun norma tidak patut dilaksanakan tanpa sepengetahuan pemegang saham (Manossoh 2016).

Ketika diantara *principal* dan *agent* terdapat asimetri informasi maka hal ini dapat dijadikan peluang oleh manager untuk melaksanakan tindakan manajemen laba untuk memanipulasi pemilik terkait ekonomi kinerja perusahaan. Semakin tinggi asimetris informasi antara *agent* dan *principal* akan semakin mendorong kesempatan untuk melakukan tindakan *earning management* oleh manajemen.

2.1.2 Good Corporate Governance

Corporate Governance ialah cara kerja yang dikembangkan guna mengoptimalkan kinerja serta perilaku dari manajemen perusahaan. Sejumlah mekanisme GCG antara lain termasuk komite independen, tidak

ada identitas ganda CEO, komite audit, tidak ada *Top Share*, dan aliansi pemegang saham untuk menghadapi pemegang saham pengendali.

Cadbury Committee mendeskripsikan GCG sebagai sistem pengatur koneksi antar pemangku kepentingan yang mempunyai kewajiban dan hak dengan emiten (Manossoh, 2016). Dalam buku "*The Power of Good Corporate Governance*" Effendi mengartikan *good corporate governance* (GCG) sebagai sistem pengendalian *control* perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengelola resiko dan dilaksanakan dengan cara peningkatan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang dan pengamanan asset. Sehingga diartikan bahwasannya GCG merupakan cara yang diterapkan oleh *stakeholder* yang bertujuan untuk memberi peningkatan dalam usaha perusahaan agar dapat mencapai nilai dari pemegang saham dalam suatu kurun waktu yang panjang tetapi tanpa mengesampingkan kepentingan pihak atau *stakeholder* yang lainnya.

Dapat ditekankan dua hal dalam *good corporate governance* (GCG), yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dan hak pemegang saham yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban dalam mengungkapkan semua informasi terkait kinerja perusahaan dengan tepat waktu, transparan, akurat dan informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan pemegang saham memiliki hak untuk mendapat semua informasi tepat waktu dan akurat.

Berdasar pada penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwasannya, GCG ialah proses penyajian dan transparansi selagi dibarengi

dengan pemberian informasi secara tepat dan akurat pada regulator serta investor saham dan publik mengenai aspek keuangan, operasional, dan sebagainya dari emiten. GCG dimaknai juga sebagai satu dari berbagai syarat yang wajib dipenuhi tiap emiten sebelum masuk didalam pasar yang memberlakukan regulasi pemerintah ataupun pasar saham (Kumaat, 2011).

System tata kelola perusahaan dalam perusahaan jika dilakukan dengan baik akan sangat bermanfaat dalam memberi proteksi yang efektif kepada kreditur dan pemegang saham dalam mendapat hasil investasi yang adil, efisien dan tepat, dan memastikan bahwasannya manajemen telah mengupayakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan. Berdasar pada buku yang diterbitkan oleh (Manossoh, 2016) Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional menafsirkan tata kelola perusahaan yang baik ada 5 prinsip :

1. Transparansi

Perusahaan diharuskan untuk menyajikan informasi yang konsisten, tepat waktu dan akurat, mudah diakses, cukup serta dapat dipertanggung jawabkan kepada para *stakeholder*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas perusahaan mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi penjelasan atau alasan atas tindakan dan perilaku perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, misalnya: hubungan industrial, kesehatan, pajak, keselamatan kerja, dan lainnya

merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Akuntabilitas berjalan seiring dengan responsibilitas.

4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menghimbau supaya perusahaan dikelola dengan professional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan tanpa ada benturan kepentingan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran & kesetaraan (*fairness*) mengacu pada perlakuan yang sama, misalnya, semua pemegang saham harus menerima pertimbangan yang sama untuk kepemilikan saham apa pun yang mereka miliki.

Dengan adanya *good corporate governance* berdasar pada teori agensi diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi yang kemudian akan memicu tindakan memanipulasi laba oleh manajer atau menekan terjadinya manajemen laba diperusahaan. Selain memiliki prinsip *good corporate governance* juga mempunyai manfaat yang banyak untuk perusahaan seperti, melindungi hak para pemegang saham, menaikkan kualitas kerja & menimbulkan *sense of belonging* pada karyawan, menciptakan efisiensi & efektivitas dalam penggunaan sumber daya, neraca keuangan perusahaan menjadi lebih baik, mencegah timbulnya KKN, meningkatkan nilai perusahaan, dan lain sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan, dengan diterapkannya *good corporate governance* akan mendukung kemampuan perusahaan dalam mengelola asset serta struktur keuangan perusahaan yang

dapat dipertanggungjawabkan dengan penuh tanggungjawab, jujur dan transparan.

Pada saat terjadinya krisis ekonomi global di Indonesia sekitar tahun 1998 GCG mulai menarik perhatian publik. *Asian Development Bank* (ADB), *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), *Bozz-Allen & Hamilton*, *World Bank*, dan *Pricewaterhouse Coopers* menyebutkan krisis dapat terjadi ialah disebabkan tidak tepenuhinya syarat kelayakan pengelolaan korporasi. Lembaga khusus yang didirikan pemerintah Indonesia dikarenakan krisis ekonomi dinamakan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (Kusmayadi, dkk. 2015).

Salah satu metode yang umumnya dipakai untuk memantau permasalahan kontrak atau membatasi perilaku oportunistik management juga bagian dari tata kelola perusahaan. Perusahaan yang tata kelolanya buruk lebih sensitif terhadap oportunistik manajemen, dimana manajemen laba dapat merusak nilai perusahaan. Pada saat yang sama, perusahaan yang memiliki tata kelola yang optimal bisa meminimalisir oportunistik manajemen yang kondusif bagi nilai perusahaan. *Good corporate governance* diwujudkan dengan adanya kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, direktur independen dan komite audit independen.

2.1.3 Dewan Direksi

Secara general, Dewan direksi dimaknai sebagai sekumpulan orang pilihan yang perannya ialah memberi nasihat pada emiten, dan juga selaku

wakil dari pihak investor saham (Anggraeni, 2019). Tiap emiten yang telah go-publik secara yuridis wajib memiliki direksi.

Dewan direksi disebut sebagai perwakilan investor saham sebab didalam emiten terkhusus emiten yang telah go-publik, secara general emiten tersebut punya banyak investor saham, sehingga tidak mungkin untuk tiap-tiapnya berkumpul bersama serta membuat putusan hingga regulasi bagi emiten. Oleh karenanya keberadaan direksi membuat pihak investor saham tetap punya partisipasi didalam pengambilan putusan bagi emiten, walau tidak terlibat dalam aktivitas operasional emiten secara langsung.

Terlebih lagi, peran Dewan direksi ialah ebagai pencipta dan pengatur mekanisme GCG didalam emiten. Dengan demikian, besaran jumlah anggotanya akan pula berdampak dihasil putusan saat terjadi proses diskusi atau rapat.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Panjaitan dan Muslih (2019) beranggapan bahwasanya kepemilikan managerial ialah besaran banyaknya saham milik managerial didalam suatu emiten, yang dalam hal ini aktivitas manajemen laba akan berbeda tergantung dari tujuannya. Oleh karenanya, kepemilikan magerial yang semakin tinggi didalam emiten, memungkinkan berkurangnya aktivitas manajemen laba. Kepemilikan pada perusahaan bisa dibagi menjadi dua golongan yaitu kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional, dijelaskan kepemilikan manajerial dilaksanakan oleh dewan komisaris serta

dewan direksi. Jensen dan Meckling mengemukakan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dengan *shareholder* dipandang dapat diselaraskan dengan kepemilikan oleh manajemen.

Dengan meningkatkan kepemilikan manajerial pada sebuah perusahaan bisa membantu mengatasi konflik kepentingan diantara *principal* dan *agent*. Adanya kepemilikan manajerial ialah agar dalam perusahaan dapat ditingkatkan lagi pengawasannya, menetapkan kebijakan yang tidak memfokus pada keuntungan salah seorang pihak, dan mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perusahaan.

Berdasar pada bahasan mengenai gambaran di atas, simpulan yang didapat ialah kepemilikan manajerial mempunyai tujuan untuk mengurangi resiko dan mengurangi resiko dalam perusahaan, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perusahann, dan supaya kebijakan yang diciptakan tidak hanya memfokuskan keuntungan salah seorang pihak namun dapat diselaraskan.

2.1.5 Firm Size

Firm size ialah besaran rerata dari *net sales* di suatu tahun. Ariyadi (2015) mendeskripsikan ukuran emiten ini sebagai seberapa besar atau kecilnya emiten yang dinilai berdasar besaran *sales value*, *asset value*, dan *equity value*. Perbedaan ukuran emiten dilihat dari rerata total aktiva, rerata total penjualan, total aktiva, serta total penjualan. Berkaitan dengan ukuran emiten, Panjaitan dan Muslih (2019) beranggapan bahwasanya indikator perusahaan besar terlihat dari pertumbuhan emiten kearah yang *positive*,

yang mana bagi para investor, emiten tersebut lebih berdaya tarik. Secara general, ukuran emiten dipakai guna memandu biaya politik, yang mana biayanya dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya ukuran hingga risiko emiten.

Biaya politik juga menjelaskan bahwasannya praktik manajemen laba disebabkan oleh peraturan pemerintah, misalnya penetapan pajak. Semakin tinggi profit dan pendapatan perusahaan, tentu akan semakin tinggi juga pajak yang wajib dibayarkan perusahaan, demikian juga sebaliknya.

Kondisi seperti ini memotivasi manajer untuk mengatur agar jumlah laba tidak terlalu tinggi sehingga jumlah pajak yang dibayarkan juga tidak terlalu tinggi. Subsidi pemerintah juga dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan jika memiliki motivasi untuk mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga perusahaan akan berusaha memanipulasi laba lebih rendah dari yang sebenarnya.

Berdasar pada sejumlah definisi mengenai ukuran perusahaan serta indikator pengukurannya, bisa diartikan bahwasannya keseluruhan nilai asset bisa dimanfaatkan menjadi indikator yang menentukan besar atau tidaknya sebuah perusahaan.

2.1.6 *Earning Management*

National Association of Certified Fraud Examiners menganggap bahwasannya *earning management* ialah bentuk kelalaian dalam membuat laporan keuangan atau kesalahan yang sengaja dibuat sehingga dalam pengambilan keputusan dapat berujung menyesatkan. Scott mendefinisikan

earning management sebagai tindakan yang mempengaruhi laba yang dipilih oleh manajer untuk menggapai beberapa tujuan laba tertentu yang dilaporkan (Manossoh, 2016).

Menurut teori yang dikemukakan Scott dalam Jannah dan Mildawati (2017), ada beberapa hal yang mungkin memicu manajemen perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Motivasi Bonus

Sebuah makalah tahun 1985 berjudul "*The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions*" oleh Healy berfungsi sebagai studi penelitian paling populer tentang manajemen laba. Dalam studinya, Healy mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan teori akuntansi manajer. Dia berhipotesis bahwasannya manajer akan menemukan peluang di mana mereka dapat memperdaya laba bersih dalam upaya untuk meningkatkan bonus yang akan dibayarkan perusahaan kepada mereka dalam bentuk kompensasi.

Dimana pada rencana bonus yang disebut juga motivasi bonus, pemilik perusahaan menjanjikan apabila perusahaan berkinerja bagus dan mencapai angka tertentu maka manajer akan diberikan bonus. Artinya semakin tinggi bonus yang diberikan kepada manajer, maka semakin tinggi juga motivasi untuk manajer melakukan manajemen laba.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya

Manajemen laba bisa dinilai berdasar pada perspektif dari kontrak efektif. Kontrak utang jangka panjang merupakan salah satu dari kontrak yang ada

pada perusahaan. Sementara perjanjian utang jangka panjang memotivasi manajer mengelola laba sehingga perusahaan memiliki keuntungan yang cukup dan kas yang cukup untuk melakukan pembayaran bunga serta pokok kepada kreditur. Pada saat perusahaan dapat melakukan kontrak, maka perusahaan setidaknya harus mempunyai reputasi yang *positive*, yang akan berdampak *positive* pada perusahaan manajemen, sehingga perusahaan akan dapat memperoleh utang dengan masa pinjaman lebih lama serta persentase suku bunga yang rendah dari kreditur. Berdasar pada asumsi *debt covenant*, perusahaan bisa saja menerapkan manajemen laba dengan aktif guna mencegah terjadinya pelanggaran *debt covenant*. Oleh karena itu, perusahaan akan memotivasi manajer untuk menerapkan praktik *earning management* untuk memenuhi perjanjian hutangnya.

3. Motivasi Politik

Aspek politik tidak terlepas dari perusahaan, terutama perusahaan besar yang kegiatan usahanya tersebar luas di seluruh tanah air yang bergerak di bidang pelayanan publik mis. transportasi umum, listrik, air, infrastruktur, komunikasi yang sering sering diperhatikan oleh pemerintah. Ciri-ciri perusahaan yang seperti ini lebih banyak meminimalisir laba guna mengurangi labanya, terutama selama perusahaan menghasilkan laba yang lebih tinggi dari biasanya atau ketika perusahaan berada pada tahap kemakmuran. Tindakan ini dilakukan untuk mendapat subsidi dari pemerintah.

4. Motivasi Pajak

Dalam motivasi pajak, perusahaan melakukan praktik *earning management* untuk menurunkan laba sebelum melaporkan pajak sehingga *billing* pajak yang dibebankan ke perusahaan akan lebih berkurang. Salah satu hal yang dapat dilakukan manajer ialah ketika perusahaan melakukan pembelian aset baru pada periode tersebut, manajer akan memilih metode penyusutan saldo menurun ganda sehingga akan meninggikan beban penyusutan serta laba sebelum melapor pajak untuk periode berjalan untuk laporan keuangan yang rendah.

5. Pergantian Direksi

Berbagai motivasi akan muncul pada masa sebelum dan sesudah pergantian Direksi. Misalnya, Direksi yang akan segera pensiun mungkin saja melakukan praktik *earning mangement* sehingga akan meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga bonus akan meningkat. Sedangkan Direksi yang kinerjanya *under performance* akan cenderung memaksimalkan keuntungan agar tidak terjadi pemecatan.

6. *Initial Public Offering*

Saat perusahaan sedang mengajukan IPO, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut belum memiliki nilai pasar. Satu-satunya cara untuk mengetahui nilai perusahaan ialah dari informasi keuangan yang tercantum pada prospektu. Informasi tersebut berguna sebagai sinyal untuk para calon investor menggambarkan nilai perusahaan. Tentunya ini juga menjadi salah satu pendorong kuat untuk perusahaan menerapkan praktik manajemen laba

agar bisa mengelabui calon investor untuk tertarik dengan kinerja keuangan yang terlihat lebih stabil dari yang sesungguhnya. Pada kasus seperti ini manajemen laba dilakukan dengan tujuan utama agar harga saham lebih tinggi. Dengan tingginya nilai saham akan meningkatkan suntikan modal untuk perusahaan mengoptimal dan meningkatkan kinerjanya.

Dalam tindakan manajemen laba pihak manajemen atau manajer dapat terlibat dalam berbagai pola manajemen sesuai dengan tujuan mereka yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut (Manossoh, 2016) :

1. Taking a bath

Biaya diakui dengan menggunakan satu kali biaya restrukturisasi. Opsi ini akan menyebabkan perusahaan menanggung beban biaya yang besar untuk tahun ini tetapi akan memperoleh keuntungan yang besar di tahun berikutnya.

2. Income minimization

Pola ini dapat dipilih oleh perusahaan yang terlihat secara politis pada saat memperoleh profitabilitas tinggi yang bertujuan agar tidak mendapat perhatian politis. Kebijakan yang dapat diterapkan dapat berupa penghapusan cepat aset modal dan aset tak berwujud, pengeluaran iklan dan pengeluaran R&D, upaya akuntansi yang berhasil untuk biaya eksplorasi minyak dan gas, dan sebagainya.

3. Income maximization

Maksimalisasi pendapatan dilakukan pada saat pendapatan menurun untuk melaporkan laba bersih yang lebih tinggi sehingga manajer akan mencapai

tingkat tolak ukur sehingga manajer akan mendapat bonus seperti yang dijanjikan.

4. Income smoothing

Usaha perusahaan dalam mengatur agar laba selalu sama atau tidak naik-turun dengan memanfaatkan kebijakan akuntansi tertentu. Perusahaan yang melakukan perataan laba memiliki motivasi pelaporan eksternal untuk menunjukkan kepada pengguna eksternal bahwasannya laba yang dihasilkan relatif stabil.

Manajemen laba umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tindakan akuntansi dan tindakan ekonomi nyata. Tindakan akuntansi pada dasarnya diketahui sebagai manajemen laba berbasis akrual di mana akrual tertentu dimanipulasi tanpa efek arus kas langsung. Manajemen laba berdasar pada basis akrual melibatkan perubahan yang tidak wajar dalam kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi (seperti masa manfaat aset, nilai sisa aset, jumlah piutang tak tertagih) dan perubahan pilihan akuntansi (seperti metode penyusutan) untuk mencapai angka target pendapatan.

Jenis manajemen laba yang kedua juga dikenal sebagai manajemen laba berbasis riil atau transaksi, di mana jenis manajemen laba ini mempengaruhi arus kas. Menurut Healy dan Wahlen, manajemen laba berbasis riil menunjuk pada percepatan penjualan, perubahan jadwal pengiriman, penundaan biaya penelitian dan pengembangan, penundaan pengeluaran pemeliharaan, dan peningkatan produksi sebagai contoh dari metode manajemen laba riil yang tersedia bagi manajer (Manossoh, 2016).

Metode yang paling sering digunakan untuk menilai tingkat *earning management* yang dilakukan oleh suatu perusahaan ialah metode akrual diskresioner seperti penyisihan untuk jangka waktu *credit*, *warranty fee*, *inventory value*, waktu, jumlah *extraordinary items* dan sebagainya. Laba memiliki dua komponen utama, kas dan penyesuaian akuntansi yang dikenal sebagai akrual. Arah dan pengukuran akrual dapat dengan mudah dimanipulasi karena sangat dipengaruhi oleh manajemen. Total akrual dibagi menjadi dua komponen, akrual diskresioner dan akrual non-diskresioner.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penyusunan riset ini memerlukan bahan-bahan penunjang yang dapat mendukung hasilnya, supaya dapat memperkuat isi riset yang berdasar pada gambaran teori yang tersedia. Beberapa jurnal yang diambil guna mendukung riset ini berasal dari jurnal bertaraf internasional dan nasional sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Earning Management</i> (Siregar, 2017)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independent, Komite Audit.	Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada <i>Earning Management</i> . Lainnya yakni Kepemilikan manajerial, Ukuran Dewan Direksi dan

		Variabel Dependen: <i>Earning Management</i>	Komite Audit memberikan hasil yang berlawanan.
2	Impact of Leverage and Firm Size on Earning Management in Indonesia (Nalarreason, dkk. 2019)	Independent Variable: <i>Leverage, Firm Size</i> Dependent Variable: <i>Earning Management</i>	Leverage has a positive effect on <i>earnings Management</i> . And, the <i>Firm Size</i> has a positive effect on <i>Earnings Management</i> .
3	Pengaruh Earning Power, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Taco dan Ilat, 2016)	Variabel Independen: <i>Earning Power, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Ukuran Perusahaan.</i> Variabel Dependen: Manajemen Laba	Dewan direksi dan Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang <i>significant</i> terhadap Manajemen Laba. Sedangkan <i>Earning Power, Komisaris Independen dan Komite Audit</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap Manajemen Laba.
4	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba (Agustia dan Suryani, 2018)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage Profitabilitas. Variabel Dependen: Manajemen Laba	Ukuran perusahaan, Umur Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas berpengaruh <i>significant</i> terhadap Manajemen Laba.
5	Manajemen Laba: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Bonus (Panjaitan dan Muslih, 2019)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kompensasi Bonus. Variabel Dependen: Manajemen Laba	Ukuran Perusahaan berpengaruh <i>negative significant</i> terhadap Manajemen Laba. Kemudian Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh <i>significant</i> terhadap Manajemen Laba. Sedangkan Kompensasi Bonus berpengaruh <i>significant positive</i>

			terhadap Laba.	Manajemen
--	--	--	-------------------	-----------

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebelum memasuki kerangka pemikiran, akan peneliti jabarkan terlebih dahulu hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti atau dibahas. Dapat dilihat sebagai berikut:

2.3.1 Kepemilikan Manajerial

Dalam teori keagenan, kepemilikan manajerial ialah salah satu komponen utama guna meminimalisir masalah dalam keagenan seperti tindakan manajemen laba, hal ini disebabkan karena ketika manajemen mempunyai saham perusahaan, maka mereka akan lebih termotivasi untuk menaikkan kinerjanya dan pada akhirnya meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan pemegang saham, di mana mereka juga bertindak sebagai *shareholder*.

2.3.2 Dewan Direksi

Dewan sebagai wakil dari pemegang saham milik emiten disebut juga sebagai dewan direksi, yang mana dewan tersebut dipilih oleh pemegang saham. Adanya Dewan direksi merupakan suatu sistim manajemen yang mendukung peran anggota direksi berjalan dengan optimal didalam melaksanakan GCG. Dewan direksi memiliki peran sebagai penelaah dan pengevaluasi kinerja manajemen yang memastikan bahwasanya emiten berjalan dengan baik serta tidak merugikan pihak pemegang saham.

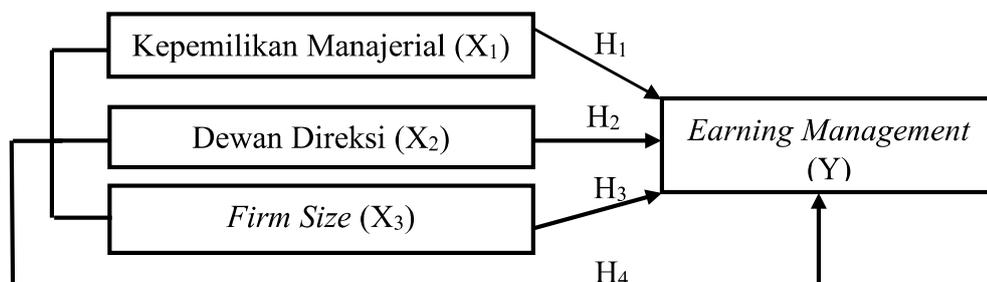
Oleh sebab itu, ukuran atau jumlahnya didalam sebuah emiten dianggap penting demi menciptakan komunikasi yang efektif antar anggotanya. Hal tersebut dikarenakan, komunikasi yang efektif memungkinkan adanya peningkatan pengawasan pada manajemen didalam emiten sehingga berpotensi mencegah dan jadi berkurangnya perilaku oportunistik manajemen.

2.3.3 *Firm Size*

Pada umumnya perusahaan besar lebih sedikit bahkan tidak membutuhkan manajemen laba. Alasannya karena mereka lebih memilih untuk mempertahankan data actual untuk mempertahankan kepercayaan dari penanam modal atau investor. Namun, manajemen laba juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar karena manajemen memiliki motivasi untuk menurunkan jumlah laba sehingga biaya politik akan berkurang.

Sehingga berdasar pada penjabaran yang telah di bahas di atas, gambaran yang dapat terlihat didalam rerangka pikir dibawah ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap riset terkait manajemen laba ini.

Berikut disajikan kerangka pikir dari riset ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasar pada rerangka pikir sub bab sebelumnya, rumusan hipotesa dapat terlihat sebagai berikut :

1. H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Earning Management*.
2. H₂: Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Earning Management*.
3. H₃: *Firm size* berpengaruh terhadap *Earning Management*.
4. H₄: Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi dan *Firm Size* berpengaruh terhadap *Earning Management*.